

**ANALISIS FUNGSI MANAJEMEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP JAKARTA  
DALAM MENGATASI TANTANGAN PENGELOLAAN SAMPAH  
DI TPST BANTARGEBAWANG**

Annisa Rahma Ariyani<sup>1\*</sup>, Vike Agestian Frastami<sup>2</sup>, Kirani Felita June<sup>3</sup>, Cahya Kayla Az Zahra Hartono<sup>4</sup>, Meirinawati<sup>5</sup>, Trena Aktiva Oktariyanda<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

**RIWAYAT ARTIKEL**

**Diterima:**  
27-04-2026

**Disetujui:**  
28-04-2026

**Dipublikasi:**  
01-06-2026

**Kata Kunci:**

*Pengelolaan Sampah; TPST Bantargebang; Fungsi Manajemen POAC*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi manajemen organisasi berdasarkan pendekatan George R. Terry (POAC) serta mengevaluasi kapasitas manajemen Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di DKI Jakarta berdampak pada meningkatnya volume sampah yang menekan kapasitas pengelolaan dan memicu kondisi overcapacity di TPST Bantargebang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual fungsi manajemen telah diterapkan, namun implementasinya belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dominasi metode open dumping, serta keterbatasan sistem pengawasan berbasis risiko. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan yang berkontribusi terhadap meningkatnya potensi risiko kegagalan struktur timbunan sampah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi fungsi manajemen, penerapan teknologi pengelolaan yang sesuai standar, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis data guna mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**PENDAHULUAN**

Di tengah arus globalisasi, peningkatan permintaan sumber daya mendorong perubahan pola konsumsi yang berdampak pada meningkatnya volume sampah. Sampah sebagai sisa aktivitas manusia menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang krusial, baik di negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Apabila tidak dikelola secara optimal, sampah dapat menimbulkan beban lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, peran pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, serta partisipasi masyarakat menjadi penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi, yang berimplikasi pada peningkatan timbunan sampah. Sampah yang dihasilkan sebagian besar diolah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang berlokasi di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, namun dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta. TPST Bantargebang merupakan salah satu fasilitas pengelolaan sampah terbesar di Asia Tenggara yang memiliki fungsi pengumpulan, pemilahan, daur ulang, hingga pemrosesan akhir sampah.



**Gambar 1. Peta TPST Bantargebang**

Gambar 1 menunjukkan lokasi TPST Bantargebang yang berada di luar wilayah administratif DKI Jakarta, sehingga pengelolannya melibatkan koordinasi lintas wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan kapasitas manajemen yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor dan kepentingan.

Sejak beroperasi pada tahun 1989, TPST Bantargebang terus mengalami peningkatan beban akibat akumulasi sampah dalam jangka panjang. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan TPST mencapai 104,7 hektare, dengan 81,40 hektare digunakan sebagai kawasan landfill yang terdiri dari beberapa zona aktif dan non-aktif. Keterbatasan lahan ini menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sampah di tengah meningkatnya volume timbulan sampah.

Pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta menunjukkan tren yang cenderung meningkat pada periode tertentu, meskipun mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap meningkatnya volume sampah harian yang harus dikelola. Selain itu, tingginya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan timbulan sampah. Sebagai muara akhir dari sebagian besar sampah yang dihasilkan, TPST Bantargebang saat ini berada dalam kondisi kritis akibat keterbatasan lahan serta akumulasi timbunan sampah yang melampaui kapasitas.

**Tabel 1. Jumlah Timbulan Sampah DKI Jakarta**

Nama Daerah di DKI Jakarta	Jumlah Timbulan Sampah (Ton/Tahun)
Kabupaten Kepulauan Seribu	30
Kota Jakarta Selatan	2.005
Kota Jakarta Timur	2.455
Kota Jakarta Pusat	858
Kota Jakarta Barat	1.943

Tabel 1 menunjukkan distribusi timbulan sampah di beberapa wilayah DKI Jakarta. Data tersebut mengindikasikan bahwa wilayah dengan aktivitas tinggi seperti Jakarta Timur dan Jakarta Selatan memberikan kontribusi terbesar terhadap volume sampah, sehingga meningkatkan beban pengelolaan di TPST Bantargebang.

Dalam menghadapi krisis pengelolaan sampah, peran Dinas Lingkungan Hidup menjadi krusial sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan publik di bidang lingkungan. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas manajemen organisasi yang mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan program, serta pengawasan yang efektif.

Di sisi lain, pengelolaan sampah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai penghasil utama sampah. Oleh karena itu, aspek perilaku, kesadaran, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan sampah (Tukahirwa et al., 2010; Fatimah et al., 2022).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, kajian yang ada masih didominasi oleh pendekatan kebijakan, teknologi, atau partisipasi masyarakat. Kajian yang secara spesifik mengaitkan kapasitas manajemen organisasi pemerintah dengan risiko operasional dan keberlanjutan lingkungan masih relatif terbatas.

Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menempatkan permasalahan pengelolaan sampah sebagai isu teknis, tanpa mengkaji secara mendalam keterkaitan antara fungsi manajemen dengan potensi kegagalan sistemik. Padahal, peristiwa longsor di TPST Bantargebang menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam integrasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami hubungan antara fungsi manajemen organisasi dengan dinamika risiko operasional dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas manajemen Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melalui pendekatan fungsi manajemen George R. Terry (POAC), guna mengevaluasi kemampuan organisasi dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan sampah serta merumuskan rekomendasi yang berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis pengelolaan sampah di TPST Bantargebang berdasarkan fungsi manajemen George R. Terry (POAC). Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena secara komprehensif melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, serta publikasi lembaga terkait yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, serta keterbaruan informasi.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tematik, yaitu dengan mengelompokkan dan menginterpretasikan data berdasarkan empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Analisis difokuskan pada kesesuaian antara konsep manajemen yang ideal dengan kondisi yang dilaporkan dalam berbagai literatur.

Untuk meningkatkan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang memiliki kesamaan topik. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak menggunakan data primer, sehingga hasil analisis bergantung pada kualitas dan kelengkapan sumber literatur yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis pengelolaan sampah di TPST Bantargebang berdasarkan fungsi manajemen George R. Terry (POAC), yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara konsep manajemen yang ideal dengan kondisi implementasi di lapangan, serta implikasinya terhadap risiko operasional dan keberlanjutan lingkungan.

### 1. Planning

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara konseptual, fungsi perencanaan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah disusun secara sistematis melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pengembangan TPST Bantargebang, pembangunan fasilitas Intermediate Treatment Facility (ITF), serta penerapan konsep 3R (reduce, reuse, recycle). Perencanaan ini bertujuan untuk mengantisipasi peningkatan volume sampah yang terus terjadi.

Namun, dalam implementasinya, perencanaan tersebut belum sepenuhnya berbasis mitigasi risiko dan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini terlihat dari masih terjadinya kondisi overcapacity serta peristiwa longsor pada tahun 2026 yang mengindikasikan keterbatasan dalam mengantisipasi daya tampung dan stabilitas timbunan sampah.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realitas operasional, di mana perencanaan belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek teknis, kapasitas, dan risiko lingkungan. Penggunaan metode open dumping juga mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan standar pengelolaan modern (Tamba et al., 2025; Kementerian Lingkungan Hidup, 2026).

## 2. Organizing

Fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan sampah melibatkan berbagai aktor, seperti DLH, Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST), sektor swasta, dan masyarakat. Secara struktural, pembagian tugas dan fungsi telah terbentuk, namun koordinasi antar aktor belum berjalan optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada ketiadaan struktur organisasi, melainkan pada lemahnya integrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Peristiwa longsor tahun 2026 memperkuat indikasi adanya ketidaksinkronan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Dengan demikian, pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan collaborative governance, di mana efektivitas tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan koordinasi antar aktor (Larasati & Puspaningtyas, 2020).

## 3. Actuating

Dalam aspek pelaksanaan, pengelolaan sampah di TPST Bantargebang pada dasarnya telah mencakup seluruh tahapan operasional, mulai dari pengumpulan hingga pemrosesan akhir. Namun, implementasinya masih didominasi oleh sistem landfill konvensional dengan metode open dumping, yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap stabilitas timbunan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belum sepenuhnya sejalan dengan standar teknis pengelolaan sampah yang aman. Peristiwa longsor tahun 2026 menjadi indikasi nyata dari kelemahan dalam implementasi, yang dapat disebabkan oleh faktor kelebihan beban, ketidakstabilan lereng, serta akumulasi gas dan lindi (Ansari & Daigavane, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara standar operasional yang seharusnya diterapkan dengan praktik di lapangan, yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kegagalan struktur.

## 4. Controlling

Fungsi pengawasan merupakan aspek penting dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Dalam praktiknya, DLH telah melakukan monitoring dan evaluasi, namun efektivitasnya masih terbatas.

Terjadinya longsor meskipun telah terdapat indikasi risiko sebelumnya menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan deteksi dini. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian belum berbasis pada analisis risiko yang komprehensif.

Dalam perspektif manajemen, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai control failure, yaitu kegagalan dalam mengidentifikasi dan merespons potensi risiko secara tepat waktu. Literatur menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan sistem berbasis data dan analisis risiko yang kuat (Jahanfar et al., 2017).

Secara keseluruhan, keempat fungsi manajemen tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang tidak berdiri sendiri pada satu aspek, melainkan merupakan hasil dari ketidakterpaduan antar fungsi manajemen. Kelemahan dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan saling berkaitan dan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko operasional.

**KESIMPULAN**

Pengelolaan sampah di TPST Bantargebang menunjukkan bahwa meskipun perencanaan telah disusun secara komprehensif melalui pembangunan infrastruktur dan penerapan prinsip 3R, implementasinya belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya aspek mitigasi risiko, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta masih dominannya praktik open dumping yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan modern. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan ketidakterpaduan antar fungsi manajemen (planning, organizing, actuating, dan controlling) yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko operasional. Oleh karena itu, perbaikan perlu diarahkan pada penguatan integrasi fungsi manajemen, penerapan teknologi pengelolaan yang lebih aman, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis risiko dan data guna mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**REFERENSI**

- Ansari, A., & Daigavane, P. B. (2021). Analysis and Modelling of Slope Failures in Municipal Solid Waste Dumps and Landfills: A Review. *Nature Environment and Pollution Technology*, 20(2), 825-831. <https://doi.org/10.46488/NEPT.2021.v20i02.045>
- Fatimah, S., Jusniaty, J., Syamsuddin, S., & Mukrimah, M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Lingkungan Bersih dan Sehat di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah. *Journal of Government Insight*, 2(2), 238–251. <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.483>
- Jahanfar, A., Amirmojahedi, M., Gharabaghi, B., Dubey, B., McBean, E., & Kumar, D. (2017). A Novel Risk Assessment Method for Landfill Slope Failure: Case Study Application for Bhalswa Dumpsite, India. *Waste Management & Research: The Journal of the International Solid Wastes and Public Cleansing Association, ISWA*, 35(3), 220–227. <https://doi.org/10.1177/0734242X16686412>
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2026). *Bantar Gebang Longsor Lagi, Menteri LH: Kita Harus Selesaikan Akar Masalah Sampah Jakarta Agar Tak Ada Lagi Korban*. Retrieved from Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. <https://kemenlh.go.id/news/detail/bantar-gebang-longsor-lagi-menteri-lh-kita-harus-selesaikan-akar-masalah-sampah-jakarta-agar-tak-ada-lagi-korban>
- Larasati, N., & Puspaningtyas, A. (2020). Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang dengan Konsep Collaborative Governance. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 8(1), 69-78. <https://doi.org/10.12928/channel.v8i1.15752>
- Tamba, W. P., Yanti, F., & Tamba, D. (2025). Jakarta Waste Management Policy and the Capacity Crisis of Bantargebang TPST: An Environmental Justice Review. *Renai*, 11(1), 14-26.
- Terry, G. R. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Tukahirwa, J. T., Mol, A. P. J., & Oosterveer, P. (2010). Civil Society Participation in Urban Sanitation and Solid Waste Management in Uganda. *Local Environment*, 15(1), 1-14. <https://doi.org/10.1080/13549830903406032>